



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jl. Raya Tuapeijat Km. 4 - Telp. (0759) 320041, Fax (0759) 320218

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERINDAG
NOMOR : 800.19.1 / 033 / KOPERINDAG

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Road Map Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2019-2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1990 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Refublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2018- 2023 (Lembaga Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2019);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
8. Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsional serta Tata kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menegah Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai;
9. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai tentang Rencana Strategis Perangkat daerah Tahun 2018-2013.

Memutuskan :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2019-2023.
- KESATU : Menetapkan dan mengesahkan Road Map Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2019-2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Dalam rangka mengoperasionalisasi Road Map Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2019-2023 sehingga dapat berjalan secara delapan area perubahan Reformasi Birokrasi yang merupakan penjabaran dari Road Map Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan;
- KETIGA : Road Map Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2019-2023 dapat diubah sesuai dengan perkembangan organisasi;
- KEEMPAT : Membebaskan biaya pelaksanaan Program dan kegiatan Reformasi Birokrasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tuapeijat
Pada tanggal 24 Juli 2023

Plt. KEPALA DINAS KOPERINDAG

DOMINIKUS SALELEUBAJA, S.Pd.MM
NIP.19741006200112 1003

ROADMAP REFORMASI BIROKRASI PADA DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2019-2023

No.	Program Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan dan Indikator	Program dan Kegiatan	Kriteria Keberhasilan Kegiatan	Indikator	Target	Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab		
							2019	2020	2021	2022	2023				
												8		9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1.	Manajemen Perubahan (Mental Aparatur/ Pola Pikir dan Budaya Kerja)	Meningkatnya integritas aparatur 70 % (uji pulih persen aparatur integritasnya tinggi)	1. Manajemen Perubahan												
			1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi												
			a.	Membentuk Tim Reformasi Birokrasi	Terbentuknya Keputusan Kepala SKPD tentang Tim Reformasi Birokrasi Dinas Koperindag	Jumlah Keputusan Kepala SKPD yang disusun	1 (satu) Keputusan Kepala SKPD								Pokja 1
			b.	Menguatkan Tim Reformasi Birokrasi	Tim Reformasi Birokrasi / kelompok kerja Reformasi Birokrasi melaksanakan tugas dengan baik sesuai tugas dan fungsinya	Jumlah pembinaan / rapat koordinasi	4 kegiatan pertahun								Pokja 1
			c.	Menyusun Rencana Kerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Tersusunnya Rencana kerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah rencana kerja tahunan	1 Rencana kerja pertahun								Pokja 1
			2. Penyusunan RoadMap Reformasi Birokrasi												
			a.	Menyusun Road Map Reformasi Birokrasi	Terbentuknya Keputusan Kepala SKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Road Map Reformasi Birokrasi	Jumlah Keputusan Kepala SKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai yang disusun	1 (satu) Keputusan Kepala SKPD								Semua Pokja
			b.	Melaksanakan internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi	Terlaksananya internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi Dinas Koperindag	Jumlah kegiatan internalisasi road map reformasi birokrasi Dinas Koperindag	2 Kegiatan/ Tahun								Semua Pokja
			3. Mengingatnya efektifitas pelaksanaan reformasi birokrasi												
			a.	Membentuk <i>agent of change</i> (agen perubahan) reformasi birokrasi	Terbentuknya Keputusan Kepala SKPD tentang agen perubahan di lingkungan Dinas Koperindag	Jumlah Keputusan Kepala SKPD yang disusun	1. Keputusan Kepala SKPD								Pokja 1
b.	Mendorong keterlibatan pimpinan di lingkungan DinasKoperindag secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi	Pimpinan di lingkungan Dinas Koperindag terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi	Persentase Pimpinan di lingkungan DinasKoperindag terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi	100 % dalam 5 tahun							Pokja 1				
c.	Membuat media komunikasi secara reguler untuk menyampaikan program/ kegiatan reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilakukan	Terlaksananya rapat-rapat reguler untuk menyampaikan program/ kegiatan reformasi birokrasi ini via media	Jumlah kegiatan rapat yang dilaksanakan	6 (enam) Kali pertahun							Pokja 1				

No.	Program Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan dan Indikator	Program dan Kegiatan	Kriteria Keberhasilan Kegiatan	Indikator	Target	Waktu Pelaksanaan						Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			d. Membuat leaflet/ banner/ x banner/ spanduk dll terkait reformasi birokrasi antara lain : budaya pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, budaya melayani dll.	Pembuatan / pemasangan leaflet / banner /x- banner/ spanduk terkait pelaksanaan reformasi birokrasi pada Dinas Koperindag/ unit kerja (budaya pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, budaya melayani dll)	Jumlah leaflet/ banner / x- banner/ spanduk berisikan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi (budaya pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, budaya melayani dll)	1 kali setahun						Pokja I	
			4. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi										
			a. Membentuk Asesor PMPRB	Dinas Koperindag memiliki asesor PMPRB internal	Jumlah asesor sesuai kebutuhan	2 Asesor						Pokja II	
			b. Mengkomunikasikan aktifitas PMPRB kepada unit kerja terkait	Tertindakannya rapat dan koordinasi Asesor PMPRB dengan unit kerja terkait	Jumlah kegiatan rapat yang dilaksanakan	2 pertemuan pertama						Pokja II	
			c. Melaksanakan kegiatan PMPRB	Tertindakannya progress, pengisian update data online PMPRB tiap Asesor	Jumlah kegiatan update data online PMPRB yang dilaksanakan	1 kali pertahun						Pokja II	
2.	Keputusan, Perundang-Undangan	Meningkatnya Kualitas produk hukum daerah yang melindungi dan berpihak pada kepentingan publik, harmonis dan tidak lumpang tirah dengan keputusan perundang undangan lainnya (95% (sembilan puluh lima persen) produk hukum daerah yang berkualitas)	Pemantauan Produk Hukum daerah										
			1. Harmonisasi										
			a. Melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap produk hukum daerah yang terkait dengan DinasKoperindag	Tertindakannya evaluasi secara berkala terhadap produk hukum daerah	Jumlah rapat Tim yang dilaksanakan	2 (dua) kegiatan evaluasi produk hukum/ tahun						Pokja II	
			2. Penyusunan dan Penyebarluasan Informasi	Keputusan Perundang Undangan	Jumlah draft produk hukum daerah yang berkualitas	1 draft produk hukum daerah/ tahun						Pokja II	
			a. Menyusun draft produk hukum daerah yang berkualitas	Tersusun draft produk hukum daerah yang berkualitas	Jumlah draft produk hukum daerah yang berkualitas	1 kegiatan/ 5 tahun							
			b. Melaksanakan sosialisasi produk hukum daerah dan Keputusan perundang-undangan lainnya	Tertindakannya sosialisasi produk hukum daerah dan Keputusan perundang-undangan lainnya berbasis teknologi informasi	Jumlah Kegiatan sosialisasi produk hukum daerah dan Keputusan perundang-undangan lainnya berbasis teknologi	1 kegiatan/ 5 tahun							
3.	Kelengkapan	Meningkatnya ketepatan fungsi dan ukuran perangkat daerah (100 % perangkat daerah tepat fungsi dan tepat ukuran)	Pemantauan Kelengkapan										
			1. Evaluasi Organisasi										
			a. Melakukan atau evaluasi organisasi / kelembagaan untuk mengetahui : 1). Kesesuaian struktur organisasi dan ketepatan tugas fungsi; 2). Mengukur jejaring organisasi; 3). Kemungkinan duplikasi fungsi; 4). Tumpang tindih fungsi dengan SKPD lain	Tertindakannya pengusul evaluasi kelembagaan	Jumlah Usulan Evaluasi	1 kali dalam 5 tahun						Pokja IV	

No.	Program Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan dan Indikator	Program dan Kegiatan	Kriteria Keberhasilan Kegiatan	Indikator	Target	Waktu Pelaksanaan						Pemangung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			2. Pemetaan Organisasi/Kelompok										
			a. Melaksanakan pemetaan organisasi / kelompok	Usulan Perubahan struktur organisasi yang tugas fungsinya masih lumpang tinggi atau belum efektif dan efisien	Jumlah dokumen usulan perubahan SOTK	1 dokumen							Pokja III
4.	Tata laksana	Menjelaskan penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, akurat, sederhana, transparan dan berbasis e-government memiliki standar operasional prosedur (SOP)	Penguatan Tata laksana										
			1. Proses Bisnis dan Prosedur operasional tetap dan Standard Operating Procedure (SOP) kegiatan										
			a. Menyusun Peta Proses bisnis level Dinas Koperindag hingga unit kerja	telah tersusun peta proses bisnis dinas koperindag	Jumlah Draft Keputusan Kepala SKPD tentang Peta Proses Bisnis	1 Keputusan Kepala SKPD							Pokja III
			b. Menyusun <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> sesuai tugas dan fungsi / layanan	Tersusunnya <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> pelayanan administratif dan	Jumlah <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i>	1 (satu) SOP setiap layanan							Pokja III
			c. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan proses bisnis dari <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> pada Dinas Koperindag	Tertaksennya evaluasi terhadap pelaksanaan proses bisnis dan <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> pada Dinas Koperindag	Jumlah kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan proses bisnis dan <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> Dinas Koperindag	1(satu) kegiatan evaluasi							Pokja III
			2. Pengembangan E-Government										
			a. Menyusun rencana pengembangan SPBE/ e-government di lingkungan Dinas Koperindag	Tersusunnya rencana pengembangan SPBE/ e-government di lingkungan Dinas Koperindag	Jumlah dokumen rencana pengembangan SPBE/ e-government yang disusun	1 (satu) dokumen							Pokja III
			b. Melaksanakan pengembangan SPBE/ e-government	Tertaksennya kegiatan, pengembangan SPBE/ e-government di lingkungan Dinas Koperindag	Jumlah kegiatan pengembangan SPBE/ e-government yang dilaksanakan	1 kegiatan							Pokja III
			c. Mengembangkan/melaksanakan sistem informasi	Tertaksennya pengembangan sistem informasi	Jumlah website penyebaran informasi yang dikembangkan / dilaksanakan	1 (satu) website							Pokja III
			3. Penerapan Keterbukaan Sistem Informasi Publik										
			a. Membuat Keputusan Kepala SKPD tentang keterbukaan informasi publik	Terbentuknya Keputusan Kepala SKPD tentang keterbukaan informasi publik	Keputusan Kepala SKPD tentang keterbukaan informasi publik	1 (satu) Sekretaris Daerah/ perubahan							Pokja IV
			b. Menyusun <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> pelayanan informasi publik	Tersusunnya <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> pelayanan informasi publik	Jumlah <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> pelayanan informasi publik yang disusun	1 (satu) <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i>							Pokja IV
			c. Melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi publik	Tertaksennya kebijakan keterbukaan informasi publik	Persentase informasi publik diupload/ diinformasikan melalui web Bagian litbang Dinas Koperindag	100%							Pokja IV
			4. Pembiakan Kualitas Pengelolaan Arsip										
			a. Menyusun kebijakan pengelolaan Arsip	Tersusunnya kebijakan pengelolaan arsip	Jumlah Dokumen kearsipan	1 dokumen							Pokja III

No.	Program Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan dan Indikator	Program dan Kegiatan	Kriteria Keberhasilan Kegiatan	Indikator	Target	Waktu Pelaksanaan						Pemangung Jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			b. Menetapkan penetapan indikator kinerja individu	Semua unit kerja menerapkan hasil penetapan indikator kinerja individu dan Sasaran Kinerja Pegawai	Persentase unit kerja yang telah menerapkan penetapan indikator kinerja individu dan SKP dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	100 % dalam 5 tahun						Pokja III		
			c. Melaksanakan pengukuran / penilaian kinerja individu bulanan / triwulanan	Semua unit kerja melaksanakan pengukuran / penilaian kinerja individu bulanan / triwulanan	Persentase unit kerja yang melaksanakan pengukuran / penilaian kinerja individu bulanan/triwulanan dengan baik	100 % dalam 5 tahun								Pokja III
			d. Melaksanakan penilaian capaian kinerja individu dari masing-masing pegawai	Semua PNS telah dinilai capaian kerjanya	Persentase PNS yang telah dinilai capaian kinerja berdasarkan penilaian kinerja dan SKP	100 % dalam 5 tahun								Pokja III
a. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai														
a. Melaksanakan aturan disiplin / kode etik/ kode perilaku pegawai sesuai Keputusan peraturan/ undang-undang	Terlaksananya penerapan aturan disiplin/ kode etik/ kode perilaku pegawai	Jumlah laporan pelaksanaan penerapan aturan disiplin / kode etik/ kode perilaku pegawai	1 (satu) laporan / penerapan									Pokja III		
b. Memberikan sanksi dan imbalan (reward) atas pelaksanaan aturan disiplin / kode etik/ kode perilaku pegawai	Terlaksananya kegiatan, pemberian sanksi dan imbalan (reward) atas pelaksanaan aturan disiplin / kode etik/ kode perilaku pegawai	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemberian sanksi dan imbalan (reward) atas pelaksanaan aturan disiplin/ kode etik/ kode perilaku pegawai	1 (satu) kegiatan/ tahun									Pokja III		
2. Pelaksanaan Evaluasi jabatan														
a. Melaksanakan evaluasi jabatan untuk menetapkan grade / kelas jabatan	Terlaksananya kegiatan, evaluasi jabatan untuk menetapkan grade/ kelas jabatan (perubahan)	Jumlah dokumen hasil kegiatan evaluasi jabatan	1 (satu) dokumen									Pokja III		
B. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian														
a. Melaksanakan update Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian sesuai kebutuhan	Terlaksananya update Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian sesuai kebutuhan	Jumlah kegiatan update Sistem Informasi M ajeman Kepegawaian	1 kegiatan pertahun									Pokja III		
b. Melaksanakan pengelolaan arsip sesuai dengan Keputusan peraturan-undang-	Terkelolanya arsip inaktif dan statis	Laporan pengelolaan arsip	1 Laporan pertahun									Pokja III		
c. Melaksanakan penataan organisasi dan SDM kearsipan	Terlaksananya penataan organisasi dan SDM kearsipan	Laporan penataan organisasi dan SDM kearsipan	1 Laporan pertahun									Pokja III		
Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia														
5. Sumber Daya Manusia	Meningkatnya profesionalisme Sumber Daya Manusia aparatur		1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Kebutuhan Organisasi											
			a. Mengusulkan dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja	Tersusunnya Analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja	Jumlah dokumen usulan Analisis jabatan dan Analisis Beban Kerja	1 kali dalam 5 Tahun	✓					Pokja III		
b. Melakukan penghitungan kebutuhan pegawai	Terlaksananya penghitungan kebutuhan pegawai	Jumlah dokumen kebutuhan pegawai Dinas Koperindag	1 (satu) dokumen		✓						Pokja III			

[illegible]

No.	Program Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan dan Indikator	Program dan Kegiatan		Kriteria Keberhasilan Kegiatan	Indikator	Target	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab	
								2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
7. Akuntabilitas	Meningkatnya pendeputan sistem akuntabilitas kinerja (Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah A)		5. Penanganan Benturan Kepentingan		Terlaksananya kegiatan Pengendalian Gratifikasi	Jumlah kegiatan Pengendalian Gratifikasi	1 (satu) kegiatan / tahun					Pokja II		
			a. Mengimplementasikan whistle Blowing System											
			a. Mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan											
			Terlaksananya kegiatan Pengendalian Gratifikasi											
			Terlaksananya kegiatan Pengendalian Gratifikasi											
			Jumlah dokumen laporan											
			1 (satu) dokumen / tahun											
			Terlaksananya kegiatan Pengendalian Gratifikasi											
			Jumlah kegiatan Pengendalian Gratifikasi											
			1 (satu) kegiatan / tahun											
6. Pembangunan Zona Integritas	Melakukan Pembangunan zona integritas	Terlaksananya Pembangunan zona integritas di Dinas Koperindag	Jumlah kegiatan Pembangunan zona integritas	1 (satu) kegiatan/ tahun								Pokja II		
													1. Peningkatan peran pimpinan dalam akuntabilitas	
													a. Mendorong keterlibatan pimpinan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi (RPJMD, renstra, RKPD, Renja)	
													Pimpinan terlibat dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi	
													Persentase keterlibatan pimpinan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi	
													100%	
													b. Mendorong keterlibatan pimpinan dalam penyusunan kinerja	
													Pimpinan terlibat (baik langsung maupun tidak langsung) dalam penyusunan kinerja	
													Persentase keterlibatan pimpinan (baik langsung maupun tidak langsung) dalam penyusunan kinerja	
													100%	
2. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia yang mengemban akuntabilitas kinerja	Adanya pejabat/ staf yang mengikuti bimbingan teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah pejabat/ staf yang mengikuti SAKIP	Setengah pejabat/ staf								Pokja II		
													a. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia yang mengemban akuntabilitas kinerja	
													Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia yang mengemban akuntabilitas kinerja	
													Jumlah pejabat/ staf yang mengikuti SAKIP	
													100%	
													b. Mendorong pimpinan melaksanakan pemantauan/pertemuan / pengkukuran atas pencapaian kinerja bawahan secara berkala	
													Pimpinan melaksanakan pemantauan/pertemuan / pengkukuran atas pencapaian kinerja bawahan secara berkala	
													Persentase pimpinan melaksanakan pemantauan / penilaian / pengkukuran terhadap kinerja bawahan	
													100%	
													c. Mendorong pimpinan melaksanakan pemantauan/pertemuan / pengkukuran atas pencapaian kinerja bawahan secara berkala	
8. Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat (Indeks Kepuasan Masyarakat minimal 80%)		1. Penerapan Standar Pelayanan		Kepuasan Kepala SKPD	1 (satu) Kepala SKPD	100%					Pokja IV		
			a. Menyusun kebijakan standar pelayanan											
			Terlaksananya kebijakan standar pelayanan											
			b. Memastikan standar pelayanan di Dinas Koperindag											
			Meningkatnya standar pelayanan											
			Persentase pemantauan maklumat standar pelayanan											
			100%											
			c. Mendorong bagian yang terkait pelayanan publik untuk membuat Standard Operating Procedure (SOP) pada pelaksanaan standar pelayanan											
			Bagian yang terkait pelayanan publik mempunyai Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan											
			Persentase bagian yang terkait pelayanan publik membuat Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan											
100%														
2. Penerapan Budaya Pelayanan Prima		Kepuasan Kepala SKPD	1 (satu) Kepala SKPD	100%							Pokja IV			
a. Menyusun kebijakan standar pelayanan														
Terlaksananya kebijakan standar pelayanan														
b. Memastikan standar pelayanan di Dinas Koperindag														
Meningkatnya standar pelayanan														
Persentase pemantauan maklumat standar pelayanan														
100%														
c. Mendorong bagian yang terkait pelayanan publik untuk membuat Standard Operating Procedure (SOP) pada pelaksanaan standar pelayanan														
Bagian yang terkait pelayanan publik mempunyai Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan														
Persentase bagian yang terkait pelayanan publik membuat Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan														
100%														

No.	Program Reformasi Birokrasi	Hasil yang diharapkan dan Indikator	Program dan Kegiatan	Kriteria Keberhasilan Kegiatan	Indikator	Target	Waktu Pelaksanaan					Penanggung Jawab
							2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			a. Membangun/mengembangkan inovasi pelayanan	Adanya inovasi yang diusulkan kompetisi inovasi pelayanan publik	Jumlah inovasi Dinas Koperindag yang masuk dalam kompetisi diderail	1 (satu) inovasi masuk kompetisi						Pokja IV
3. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terkait kualitas pelayanan publik												
			a. Menyusun kebijakan Pelayanan Pengaduan secara online	Tersusunnya Keputusan Kepala SKPD tentang pedoman pengelolaan Pelayanan Publik	Jumlah Keputusan Kepala SKPD tentang pedoman pengelolaan pelayanan publik	1 (satu) Keputusan Kepala SKPD						Pokja IV
			b. Menyusun Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan pengaduan	Tersusunnya Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan pengaduan	Jumlah Standard Operating Procedure (SOP) pelayanan pengaduan yang ditetapkan	1 (satu) SOP						Pokja IV
			c. Menindaklanjuti pengaduan yang masuk sesuai Standard Operating Procedure (SOP) untuk perbaikan pelayanan	Menindaklanjuti pengaduan pelayanan publik yang masuk sesuai Standard Operating Procedure (SOP)	Persentase tindak lanjut pengaduan pelayanan publik yang masuk sesuai Standard Operating Procedure (SOP)	80%						Pokja IV
			d. Melaksanakan evaluasi atas penanganan pengaduan di Dinas Koperindag	Tertaksananya evaluasi atas penanganan pengaduan di Dinas Koperindag	Persentase pengaduan pelayanan publik yang dapat dievaluasi	100%						Pokja IV
9.	Quick Wins Reformasi Birokrasi	Terwujudnya dampak nyata Reformasi Birokrasi pada pelayanan masyarakat	1. Penusunan Rumusan Quick Wins									
			a. Menetapkan kebutuhan pelayanan masyarakat yang mudah dilaksanakan dalam waktu cepat	Tertetapkannya kebutuhan pelayanan masyarakat yang mudah dilaksanakan dalam waktu cepat	Jumlah pelayanan masyarakat yang mudah dilaksanakan dalam waktu cepat	1 (satu) dokumen						Pokja IV

